

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu bagian dari akun dalam laporan keuangan yang sangat umum kita temui adalah aset tetap. Warren dkk (2019: 486) berpendapat bahwa, aset tetap merupakan aset yang relatif memiliki sifat permanen seperti mesin, tanah, gedung atau bangunan yang sifatnya jangka panjang. Aktiva tetap adalah salah satu bagian dari akun aset pada neraca yang juga dapat ditemukan dalam laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat dengan SKPD (Tipan dkk, 2016). Berdasarkan paragraf ke-6 PSAK 16 tentang Aset Tetap, aset tetap memiliki definisi aset yang digunakan dalam hal penyediaan barang atau jasa, untuk tujuan administratif, untuk disewakan kepada pihak lain, memiliki wujud dan satu periode adalah perkiraan dapat penggunaannya.

Menurut Prihartono (2021), keberadaan aset tetap sangat krusial pada setiap entitas, baik itu entitas bisnis maupun entitas pemerintah. Hal ini karena aset tetap berfungsi sebagai pemberi informasi tentang aset organisasi yang akan membantu memperoleh pelaporan keuangan yang akurat, penilaian bisnis, dan analisis keuangan yang menyeluruh. Setiap entitas akuntansi dan pelaporan

keuangan memiliki kebijakan akuntansi untuk mencatat, mengukur, dan menyajikan setiap akunnya mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Paragraf ke-13 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan menjelaskan bahwa entitas dapat menerapkan dan memilih kebijakan akuntansi secara konsisten transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang serupa entitas tersebut, kecuali jika PSAK mengizinkan atau secara spesifik mengatur kelompok item-item dimana kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang mungkin sesuai dengan keadaan.

Di Indonesia kita mengenal Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diadopsi dari IFRS (*International Financial Report Standard*) sebagai salah satu pedoman untuk akuntansi keuangan. Perusahaan (organisasi) yang memiliki akuntabilitas publik, baik itu perusahaan yang sudah terdaftar pada pasar modal, maupun perusahaan yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal menggunakan PSAK sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan-kebijakan akuntansinya (Zsazya, 2020).

Berbeda halnya dengan entitas bisnis atau perusahaan publik lainnya, entitas di bawah naungan pemerintah baik itu entitas pemerintah pusat maupun entitas pemerintah daerah mempunyai standarnya sendiri untuk menyusun laporan keuangannya yang disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Di Indonesia sendiri kewajiban entitas pemerintah untuk wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah akrual dimulai sejak tahun 2015 (Eka, 2017). Tujuan umum diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah adalah untuk melihat

dengan jelas perbandingan laporan keuangan baik antar periode laporan keuangan entitas itu sendiri, maupun dengan entitas lainnya (Yoga dkk, 2017). Standar Akuntansi Pemerintah ini dirancang oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau yang disingkat dengan KSAP. Akibat dari pedoman standar yang berbeda, maka pencatatan, pelaporan dan penyajian akuntansi pemerintah akan berbeda dengan pencatatan, pelaporan dan penyajian akuntansi keuangan pada umumnya. Begitu juga dengan akun aset tetap yang ada di entitas pemerintah. Akun aset tetap memiliki peraturan sendiri dalam PSAP dimana pencatatan, pengklasifikasian, dan penyajiannya akan berbeda dengan akuntansi keuangan biasa. Lebih lanjut, peraturan mengenai akuntansi aset tetap pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Sutri dkk pada tahun 2015, dengan menganalisis salah satu entitas yang ada di kota Tomohon yakni Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon berkaitan dengan pengelolaan aset tetapnya. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 Tahun 2007 dengan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh pemerintah kota Tomohon khususnya pada satker Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. Penelitian ini menganalisis siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan dan kelengkapan dokumen-dokumen sumber aset tetapnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aktualisasi siklus pemindahtanganan dan penghapusan aset tetap merupakan tindakan yang saling berhubungan dan pelaksanaannya telah sesuai dalam menghapus aset tetap dari

daftar barang milik daerah yang penggunaannya tidak lagi optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk mengulik lebih lanjut bagaimana tinjauan atas penerapan akuntansi aset tetap yang digunakan oleh salah satu satuan kerja (satker) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo atau yang selanjutnya disebut dengan Disdukcapil Kab. Karo. Dengan meninjau penerapan akuntansi aset tetap yang ada pada Disdukcapil Kab. Karo, penulis berharap bisa mengetahui sudahkah penerapan akuntansi aset tetap yang diberlakukan pada Disdukcapil Kab. Karo sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Berdasarkan hal itu, penulis mengajukan judul Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah seperti di bawah ini:

1. Apa saja kebijakan yang digunakan oleh Disdukcapil Kab. Karo atas akuntansi aset tetapnya untuk tahun 2019 dan tahun 2020?
2. Apakah kebijakan yang diterapkan oleh Disdukcapil Kab. Karo atas pelaksanaan atas akuntansi aset tetap sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap?
3. Bagaimana pemeliharaan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kab. Karo atas aset tetap yang dimiliki?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini, tentunya penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Berikut adalah tujuan yang penulis harapkan dalam penyelesaian karya tulis ini:

1. Memahami kebijakan yang diberlakukan oleh Disdukcapil Kab. Karo atas akuntansi aset tetapnya pada tahun 2019 dan tahun 2020;
2. Mengetahui apakah kebijakan yang digunakan dan diterapkan oleh Disdukcapil Kab. Karo atas akuntansi aset tetapnya sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; dan
3. Mengetahui bagaimana pemeliharaan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kab. Karo atas aset tetap yang dimiliki.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan karya tulis ini akan penulis batasi sebatas tinjauan atas penerapan akuntansi aset tetap pada Disdukcapil Kab. Karo dalam dua periode akuntansi yakni tahun 2019 dan 2020. Pembatasan ruang lingkup pembahasan ini diharapkan agar dapat membahas secara detail mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada Disdukcapil Kab. Karo. Selain itu, penulis akan meninjau khusus untuk tahun 2019 dan 2020 saja agar hasil tinjauan lebih relevan dengan keadaan saat ini.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti di bawah ini:

1. Sebagai media untuk menambah wawasan bagi pihak terkait penerapan akuntansi aset tetap pada entitas pemerintah;

2. Menjadi salah satu bentuk sumbangsih penulis dalam ilmu pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi aset tetap pemerintah; dan
3. Sebagai saran bagi objek karya tulis dalam hal ada penerapan akuntansi aset tetap yang belum sesuai dengan PSAP 07.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan gambaran umum mengenai karya tulis ini. Cakupan dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan KTTA.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini akan menjelaskan apa saja hal yang menjadi dasar penulisan karya tulis ini seperti Peraturan Perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta bahan literatur lain sebagai landasan teori karya tulis ini.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan berisikan metode pengumpulan data yang dilakukan penulis serta pembahasan mengenai data-data yang telah terkumpul agar menjadi satu kesatuan yang informatif dan sesuai dengan topik karya tulis ini.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan mengenai atas tinjauan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga akan menjadi penutup dalam karya tulis ini.